ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PSAP NOMOR 05 TAHUN 2010 PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU

Mirna¹, Wa Ode Adriani Hasan²

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: mirnalamura13@gmail.com

ABSTRAK

Persediaan merupakan urat nadi pada perusahaan dagang, manufaktur, organisasi bisnis, dan juga instansi di bidang pelayanan pemerintah yang masuk di dalam aset lancar. Persediaan adalah pendukung dari kegiatan pelayanan dan juga jual beli, dan cukup berarti pada aset lancar perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi persediaan sesuai PSAP No 5 Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa perlakuan akuntansi persediaan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 5, yaitu persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Kata Kunci: Akuntansi, Persediaan, PSAP.

ABSTRACT

Inventory is the lifeblood of trading companies, manufacturing, business organizations, and also agencies in the field of government services which are included in current assets. Inventory is a support for service activities and also buying and selling, and is quite significant in the company's current assets. This study aims to determine the inventory accounting treatment according to PSAP No. 5 at the Baubau City Trade and Industry Office. The method in this study is to use a qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the accounting treatment of inventories is in accordance with Statement of Government Accounting Standards No. 5, namely inventories are recognized when the potential future economic benefits are obtained by the government and have a value or cost that can be measured reliably and when received or ownership rights and/or control transfers.

Keywords: Accounting, Inventory, PSAP

1. PENDAHULUAN

Dalam menciptakan suatu sistem penataan pemerintahan yang baik, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Upaya ini dilakukan karena dengan adanya tuntutan publik terhadap pemerintah agar dapat mengelola secara profesional dan efisien dengan membuka kesadaran bagi setiap orang terutama bagi aparat pemerintahan agar senantiasa tanggap dan peka terhadap tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang baik secara transparan dan memiliki akuntabilitas, serta dengan mengembangkan berbagai kebijakan akuntansi pemerintah dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (A'yun, 2019).

Ketentuan tentang penerapan SAP berbasis akrual dilakukan secara bertahap, pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, SAP lampiran I berbasis akrual diterapkan mulai peraturan tersebut disahkan dan selambat-lambatnya pada tahun 2014. SAP lampiran II dapat tetap diterapkan hingga tahun 2014 apabila pada masa peralihan, entitas tersebut belum siap menggunakan SAP berbasis akrual (Mardiasmo, 2018).

Persediaan diibaratkan seperti urat nadi dalam perusahaan manufaktur, organisasi bisnis, dagang, dan instansi di bidang pelayanan pemerintah juga termasuk dalam aset lancar. Dalam upaya menyampaikan atau memberikan pelayanan publik harus dilakukan pengukuran dalam kinerja sektor publik yang membantu pemerintah untuk berfokus pada tujuan dan Sasarannya, membantu memperbaiki kinerja pemerintahan yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas organisasi sektor publik dan meningkatkan efisiensi untuk menyampaikan atau memberikan pelayanan publik. Persediaan meliputi perlengkapan atau barang yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor. Tanpa adanya persediaan tentunya akan menghambat instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan wilayah pemerintahan yang begitu luas (Alouw, dkk, 2022).

Persediaan pemerintah masih dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pemerintah, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, persediaan juga dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional pemerintahan. Persediaan dalam pemerinragan termasuk ke dalam aset lancar karena persediaan diharapkan dapat segera dipakai dalam kurun waktu 12 bulan setelah pelaporan (Hakim, 2020).

Pengelolaan persediaan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta harus mengacu pada PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dalam Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Persediaan yang dikelola secara teratur menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap lembaga maupun instansi pemerintahan agar dapat mengurangi kekeliruan atau kesalahan dalam pencatatan persediaan (Tangkuman, dkk, 2018).

Pada Dinas pemerintahan seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, persediaan merupakan bagian yang penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dalam memenuhi tugas instansi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk komoditas atau peralatan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang bekas pakai. Tanpa persediaan tentu akan sulit bagi instansi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan jumlah penduduk yang tinggi dan wilayah pemerintahan yang luas. Dengan tidak adanya persediaan pula, kegiatan operasional instansi pemerintahan akan terganggu karena persediaan juga termasuk sebagai barang pendukung dalam lancarnya kegiatan operasional instansi. Berdasarkan pentingnya pengelolaan persediaan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat serta mulai berlakunya Standar Akuntansi Pemerintahan tentang akrual basis sehingga mendorong penulis untuk melakukan pengamatan tentang perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah adalah, bagaimana penerapan perlakuan akuntansi persediaan sesuai dengan PSAP Nomor 05 pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Berdasarkan Kartikahadi, dkk (2016) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Halim dan Kusufi (2012) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.2. Akuntansi Pemerintahan

Secara umum pengertian akuntansi pemerintahan yaitu aplikasi akuntansi dalam bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahap melaksanakan anggaran (*budget execution*), yang termasuk semua pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang sifatnya permanen ataupun yang hanya seketika pada semua tingkatan dan unit pemerintahan (Umboh dan Tinangon, 2021). Akuntansi Pemerintahan merupakan aspek akuntansi yang memiliki keterkaitan dengan suatu institusi pemerintahan yang tujuannya tidak untuk mencari laba. Walaupun seperti yang diketahui sebuah institusi pemerintah berukuran besar, namun dalam perusahaan ia termasuk dalam golongan lembaga mikro (Kustandi, 2015)

2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai acuan dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan. Karena pentingnya SAP dalam ruang lingkup pemerintahan, maka SAP harus dikembangkan lagi untuk menciptakan laporan keuangan yang baik dan benar (Mahmudi, 2011 dikutip dalam Tangkuman, dkk, 2018).

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; (3) Pengungkapan (Nordiawan, 2009 dikutip dalam Ningtyas dan Widyawati, 2015).

2.4. Akuntansi Persediaan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Paragraf 4 Nomor 71 Tahun 2010, persediaan merupakan aset lancar berbentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan atau digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari instansi pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan (Nordiawan, 2015 dalam Hendri, dkk, 2020).

2.5. Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 05

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 yaitu tentang Akuntansi Persediaan. PSAP 05 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu lampiran I.06 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI dan dalam

lampiran II.06 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akruar. Tujuan PSAP Nomor 05 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2.6. Pengakuan Persediaan

Berdasarkan PSAP Nomor 05, persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

2.7. Pengukuran Persediaan

Berdasarkan PSAP Nomor 05, persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan (PSAP Nomor 05 paragraf 19).
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis (PSAP Nomor 05 paragraf 22).
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (PSAP Nomor 05 paragraf 22 dan 24).

2.8. Pencatatan Persediaan

Akuntansi pemerintahan dalam mencatat pengadaan persediaan menggunakan metode fisik (*physical method*) atau metode periodik (*periodical method*) artinya persediaan yang diperoleh atau diadakan dicatat sebagai “belanja” yang merupakan komponen atau nominal/temporer. Namun persediaan yang dibeli/diperoleh secara fisik dan diadministrasikan oleh bagian gudang/barang berdasarkan prinsip perpetual. Secara periodik (biasanya akhir tahun buku) berdasarkan hasil perhitungan fisik, nilai persediaan dicatat dalam akun “persediaan” di sisi debit, dan akun “cadangan” dicatat di sisi kredit. (Umboh dan Tinangon, 2021).

2.9. Pengungkapan Persediaan

Berdasarkan PSAP Nomor 05, laporan keuangan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Sugiyono, 2013 dikutip dalam Putri, 2020).

3.1.2 Sampel

Sugiyono (2016), menjelaskan bahwa bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2016), menyebutkan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penelitiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Neraca dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) pada Tahun 2019 – 2022 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data yang diperoleh penulis merupakan data yang didapat langsung dari Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian lapangan, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau berupa penjelasan serta penjabaran mengenai perlakuan akuntansi sesuai standar akuntansi pemerintahan nomor 05. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berasal dari buku, jurnal-jurnal, skripsi dan dari internet.

3.3. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2013).
2. Wawancara (*Interview*) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016).
3. Dokumentasi (*Documentation*) merupakan teknik pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016).

3.4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, memperoleh data dan fakta yang berkaitan dengan tujuan judul yang diambil dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini berlangsung.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah. Penelitian ini mempelajari tata cara dan juga menganalisis penerapan perlakuan akuntansi persediaan, apakah sudah sesuai dengan PSAP Nomor 05.

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1 Tahap yang pertama, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.
- 2 Tahap kedua, yaitu pengumpulan data berupa dokumentasi mengenai penerapan perlakuan akuntansi persediaan PSAP No. 5.
- 3 Tahap ketiga, yaitu menganalisis data-data yang sudah didapatkan menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui kesesuaian Akuntansi Persediaan atau perlengkapan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 5 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

- 4 Tahap keempat, setelah melakukan analisis, maka akan diperoleh hasil penelitian dan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka akan ditarik kesimpulan serta akan diberikan saran

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Persediaan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 05 pada bagian umum menjelaskan bahwa persediaan merupakan aset yang berupa: (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi; (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau berupa ATK seperti buku, kertas, tinta printer dan perlengkapan habis pakai lainnya.

Berikut adalah Tabel nilai persediaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau:

Tabel 1. Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember Tahun 2019- 2022

Jenis Persediaan	Jumlah (Rp)	Tahun
Alat Tulis Kantor	290.000	2019
Alat Tulis Kantor	210.000	2020
Alat Tulis Kantor	540.000	2021
Alat Tulis Kantor	510.000	2022

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau

Dari hasil penelitian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau dan juga dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa perlengkapan/persediaan yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau telah sesuai dengan PSAP Nomor 05 yaitu barang/perlengkapan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.

2. Pengakuan Persediaan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 pada bagian Pengakuan menjelaskan bahwasanya persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa

depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Wawancara dilakukan dengan Bendahara Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau yaitu Bapak Kasim, S.IP yang menjelaskan “Persediaan itu kita catat dengan nilai belinya, jadi dia ada nilainya di laporan pencatatannya, sedangkan untuk biaya sendiri tidak dicatat atau diakui jadi biaya, Cuma dia dijelaskan dengan adanya mutasi masuk dan mutasi keluar dari barang-barang yang sudah kita beli dan digunakan pada bidang-bidang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag)” (Senin, 19 Juni 2023).

Pengakuan persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau telah sesuai dengan PSAP Nomor 05 yaitu persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau memiliki potensi manfaat masa depan yang diperoleh oleh pemerintah.

3. Pengukuran Persediaan

Dalam PSAP Nomor 05 bagian pengukuran dijelaskan bahwa persediaan disajikan sebesar: (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Di bawah ini adalah Laporan Persediaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

Tabel 2. Laporan Pencatatan Persediaan Tahun 2020

Uraian	Mutasi Masuk Barang			Mutasi Keluar Barang		Saldo Persediaan per 31 Des 2020	
	Jml Brg	Hrg Satuan (Rp)	Nilai Brg (Rp)	Jml Brg Jan 2020	Jml Brg Des 2020	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
Kertas HVS F4	5	50.000	250.000	0	3	2	100.000

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau

Dari Laporan Pencatatan Persediaan Tahun 2020 di atas dapat kita lihat bahwasanya persediaan yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Baubau dicatat dengan menggunakan harga perolehannya. Persediaan didapatkan dengan menggunakan pembelian sehingga dapat diukur nilainya.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan pengukuran persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau sudah sesuai dengan PSAP Nomor 05 Tahun 2010.

4. Pengungkapan Persediaan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 dalam bagian pengungkapan menjelaskan bahwa dalam laporan keuangan mengungkapkan: (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; (2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan (3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Persediaan yang disajikan dalam Neraca pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 3. Neraca SKPD 31 Desember 2022

URAIAN	JUMLAH
1	2022
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Bank	
Kas di Kas Daerah	
Kas di Bendahara Penerimaan	
Kas di Bendahara Pengeluaran	
Kas di Kas BLUD RSUD	
Kas di Bendahara Dana JKN FKTP	
Kas di Bendahara Dana BOS	
Kas di Kas Lainnya	
Investasi Jangka Pendek	
Piutang	
Piutang Pendapatan	
Piutang Pajak Daerah	
Piutang Retribusi Daerah	1,098,960,850.00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
Piutang Pendapatan Lainnya	
Penyisihan Piutang Pendapatan	(987,472,070.00)
Piutang Lainnya	
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
Beban Dibayar Dimuka	
Persediaan	510,000.00
JUMLAH ASET LANCAR	(875,473,290.00)

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau

Pada laporan Neraca terlihat bahwa nilai persediaan langsung dicatat dengan nilai harga tertera yang ada pada laporan persediaan sebelumnya. Sehingga diketahui bahwa pada pengungkapan persediaannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

Hasil analisis data yang telah didapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau bahwa pengungkapan persediaan yang ada pada laporan keuangan Dinas Perdagangan Kota Baubau sesuai dengan PSAP Nomor 05.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Paragraf 4 Nomor 71 Tahun 2010, persediaan merupakan aset lancar berbentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari instansi pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan (Nordriawan dan Hendri, dalam Ismail, dkk, 2021).

Adapun perlakuan akuntansi persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau yaitu terdapat pengklasifikasian persediaan, pengakuan persediaan, pengukuran persediaan serta pengungkapan persediaan.

1. Klasifikasi Persediaan

Klasifikasi persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau yaitu terdiri dari barang-barang ATK seperti: kertas HVS, amplop, tinta printer, pulpen dan perlengkapan ATK lainnya. Sedangkan untuk barang-barang cadangan yang disimpan yang mempunyai cadangan strategis bagi pemerintah seperti cadangan pangan tidak ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau. Persediaan ATK yang

telah dibeli langsung akan dibagikan pada masing-masing bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.

2. Pengakuan Persediaan

Berdasarkan PSAP Nomor 05, persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau mengakui persediaan yang telah diterima berikut diikuti dokumen pendukungnya seperti nota pembelian. Persediaan yang telah dibeli juga kemudian akan disimpan pada lemari penyimpanan kemudian selanjutnya akan dibagikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan persediaannya. Persediaan pada Disperindag Kota Baubau juga memiliki nilai sehingga dapat diukur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengakuan persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau telah sesuai dengan PSAP Nomor 05.

3. Pengukuran Persediaan

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau persediaannya disajikan sebesar biaya perolehan ketika membeli barang persediaannya. Sedangkan untuk persediaan yang merupakan hasil produksi dan persediaan yang diperoleh dari donasi belum ada pada Disperindag Kota Baubau.

Persediaan pada Disperindag Kota Baubau menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) yang mana barang persediaan yang pertama dibeli adalah persediaan yang pertama juga dibagikan kepada bidang-bidang di Dinas Perdagangan Kota Baubau. Berdasarkan simpulan di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau telah sesuai dengan PSAP Nomor 05.

4. Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan persediaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau menjelaskan bahwa dalam laporan CALK dijelaskan dulu mengenai persediaan yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau. Dalam laporan keuangan juga tidak dicantumkan penjelasan mengenai penggunaan perlengkapan persediaan yang telah digunakan, namun tetap dicatat pada mutasi keluar pada laporan persediaan barang yang disusun oleh bendahara barang pada Disperindag Baubau. Selanjutnya dalam

laporan keuangan Disperindag Baubau apabila ada persediaan dalam proses produksi yang akan diserahkan pada masyarakat akan dicatat serta dilaporkan juga pada laporan keuangan, namun untuk sekarang sudah jarang sekali untuk penyerahan barang kepada masyarakat. Terakhir, tidak ada persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang sehingga tidak ada pelaporan mengenai hal tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelina Deborah Umbuh dan Jantje J. Tinangon (2021) bahwa Dinas Kesehatan Kota Manado memiliki persediaan berupa Obat-obatan dan Alat Tulis Kantor, serta mengakui persediaan tersebut pada saat barang benar-benar diterima beserta kelengkapan dokumennya serta menyimpulkan bahwa dalam pengklasifikasian persediaan serta pengakuan persediaan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 Tahun 2010.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, penulis menemukan bahwa perlakuan akuntansi persediaan yang diterapkan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau mulai dari Pengklasifikasian Persediaan, Pengakuan Persediaan, Pengukuran Persediaan, dan Pengungkapan Persediaan sesuai dan sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 5 Tahun 2010.

6. SARAN

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama disarankan agar mengembangkan studi literatur yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Erlangga: Jakarta.
- Hendri, W., Mariati, M., & Tamsil, T. 2020. Penerapan PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan pada Kantor Inspektorat Kab. Bantaeng. *Accounting Journal*. Vol. 1, No. 1, 305-312.
- Kartikahadi, Hans., Sinaga, Rosita Uli., Syamsul, Merliyana., & Siregar, Sylvia Veronica. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kustandi, Arnita. 2015. *Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Edisi Pertama*. Salemba Empat: Jakarta.

- Ningtyas, Pravitasari Eka., & Widyawati, Dini. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4, No. 1, 1-15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan. Jakarta.
- PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan. <https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-05/>
- Putri, Luis Diana. 2020. *Analisis Pencatatan Persediaan Menggunakan Metode Perpetual*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Tangkuman, Steven J., Aprillinda Angie Waworega., & Hendrik Manossoh. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13, No. 4, 214-219.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali: Jakarta.
- Umboh, Angelina Deborah., & Tinangon, Jantje J. 2021. Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 9, No. 2, April. 967-974.